

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA RIMBA SOPING KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU

Oleh :
Ris Artalina Tampubolon¹, Jenny Yelina Rambe², Desy Andarini³, Khoirul Kholik Nasution⁴
^{1,2,3,4} Universitas Graha Nusantara
¹email: risartalina22@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 19 April 2024
Revisi, 10 Mei 2024
Diterima, 14 Mei 2024
Publish, 15 Mei 2024

Kata Kunci :

Program Keluarga Harapan (PKH),
Kesejahteraan Masyarakat Desa.

ABSTRAK

Profesi kebanyakan masyarakat Desa Rimba Soping yaitu bertani/berladang. Tetapi mereka tidak memiliki lahan sendiri atau menjadi buruh tani di lahan orang lain. Semakin tingginya biaya kebutuhan hidup membuat banyak dari mereka yang masih butuh bantuan dari pemerintah seperti bantuan program keluarga harapan (PKH). Tujuan program keluarga harapan (PKH) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rimba Soping. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rimba Soping serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi program keluarga harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan dana dari pemerintah belum dapat sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan namun disisi lain dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Faktor-Faktor yang menghambat implementasi PKH ini yakni pendidikan kepala keluarga yang masih rendah, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai petani masih rendah karena mereka hanya sebagai buruh tani, pertambahan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan desa lainnya di kecamatan yang sama. Kemudian implementasi program keluarga harapan (PKH) ini belum berjalan dengan baik, sebab masih banyak kendala baik dalam ketepatan jumlah nominal dan waktu pencairan dananya serta bantuan biaya pendidikan anak usia sekolah tidak dipergunakan dengan maksimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Ris Artalina Tampubolon
Afiliasi: Universitas Graha Nusantara
Email: risartalina22@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Merebaknya wabah virus Covid -19 di awal tahun 2019 telah memberikan dampak yang sangat besar di semua negara tak terkecuali Indonesia. Kenyataan membuktikan bahwa virus yang dikenal dengan Covid-19 telah memberikan dampak yang tidak baik bagi keadaan sosial dan ekonomi Indonesia sejak tahun 2019. Akibat yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah terhentinya perekonomian serta

memuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sementara biaya kebutuhan hidup semakin meningkat setiap harinya sehingga menjadi pemicu meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat. Miskin merupakan keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutan sehari-hari atau kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya. (Kholif, 2015). Terpenuhinya hak dasar adalah bagian dari jaminan sosial, yang mana bagian

dari jaminan sosial itu ada dan menjadi salah satu hak yang fundamental bagi semua warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar negara kita yang mengatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Sehingga berdasarkan isi undang-undang tersebut maka untuk dapat menjamin sistem sosial masyarakat maka pemerintah membuat sebuah program jaminan sosial kepada masyarakat yang tujuan utamanya di khususkan bagi mereka yang termasuk kedalam kategori miskin.

Sebagai program bantuan yang diberikan oleh pemerintah, program keluarga harapan memiliki syarat yang harus dipatuhi setiap keluarga yang menerima bantuan, contohnya dalam program keluarga harapan ini bantuan yang diberikan kepada keluarga yang menerima seperti dalam pendidikan, kesehatan baik bagi anak-anak, ibu yang sedang mengandung/menyusui serta para orangtua yang lanjut usia. Tentunya ini memberikan dampak kepada cara berpikir dan perilaku setiap keluarga penerima bantuan akan betapa sangat berartinya pendidikan serta kesehatan untuk mereka. Berubahnya cara berpikir terutama dalam hal pendidikan tentunya memberikan dampak signifikan terhadap minimnya eksploitasi anak di usia sekolah. Untuk mewujudkannya tentu pemerintah harus lebih meningkatkan perhatian dan pelayanannya di bidang tersebut bagi mereka yang dikategorikan sebagai keluarga miskin dan sangat miskin. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pada program ini pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga yang termasuk kategori kurang mampu (miskin) sebagai syaratnya mereka harus meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Bantuan program keluarga harapan memberikan dampak jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka baik dalam pendidikan maupun kesehatan di setiap keluarga penerima bantuan. Hal tersebut dilakukan untuk memutuskan rantai kemiskinan antar generasi.

Bantuan program harapan keluarga (PKH) atau *Conditional Cash Transfer (CCT)* merupakan program bantuan tunai bersyarat pertama di Indonesia yang bekerjasama dengan bank dunia dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, menyekolahkan anak dan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak (Parwoto, 2001). Bantuan program keluarga harapan (PKH) pada awalnya dilaksanakan di tujuh provinsi yang ada di Indonesia kemudian dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2014. Program bantuan keluarga harapan (PKH) merupakan program yang sangat diandalkan di era pemerintahan presiden

Joko Widodo dalam upaya mengatasi kemiskinan walaupun masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Pada tahun 2015, Desa Rimba Soping merupakan salah satu desa dimana masyarakatnya penerima bantuan dari program tersebut. Desa Rimba Soping merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Desa rimba soping memiliki penduduk sebanyak 6.292 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 447 kepala keluarga. Dengan perincian keluarga yang memiliki balita (bayi di bawah 5 tahun) sebanyak 140 kepala keluarga (KK), keluarga yang memiliki remaja sebanyak 200 kepala keluarga, keluarga yang memiliki lansia (lanjut usia) sebanyak 100 kepala keluarga. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Rimba Soping adalah sebagai petani/berladang di lahan milik orang lain.

Melihat dari rincian karakteristik masyarakat Desa Rimba Soping, masih banyak terdapat usia belum/tidak produktif (balita/lansia) pada setiap keluarga dimana sangat dibutuhkan biaya yang besar dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jika hanya mengandalkan upah dari buruh tani dipastikan tidak akan dapat memenuhi besarnya kebutuhan mereka. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan program keluarga harapan (PKH). Desa Rimba Soping menjadi salah satu desa dengan penerima bantuan terbanyak jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu yakni sebanyak 133 kepala keluarga (KK). Bantuan yang pada awalnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan keluarga, tapi disisi lain ada indikasi bahwa bantuan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari program harapan keluarga (PKH) tersebut.

Penelitian mengenai bantuan program keluarga harapan (PKH) yang dana bantuannya digunakan tidak sesuai tujuan dari PKH itu juga terjadi dengan penelitian yang sama oleh Ernawatri (2020) bahwa penerima dana dari program di Desa Buluh Dori tidak mengindahkan aturan dan tujuan dari kegunaan dana bantuan tersebut, dimana mereka memakai bantuan tersebut untuk membeli sesuatu di luar dari kebutuhan pokok anak mereka seperti membeli telepon genggam/handphone, mainan, baju baru hingga membayar cicilan kredit bulanan. Tentu hal tersebut sudah jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Indrawati (2018) mengenai bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Juwet, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa masyarakat Desa Juwet terbilang banyak yang tidak paham mengenai tujuan dari pemberian dana tersebut dan menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai program keluarga harapan (PKH) apakah program tersebut dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidiimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidiimpuan.

2. METODE PENELITIAN

Untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian maka dibutuhkan sebuah metode yang tepat agar mempermudah dalam menganalisis masalah yang diteliti. Untuk mempermudah dalam menganalisis masalah dalam penelitian tersebut maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami dimasyarakat. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku atau dari sumber lainnya (Martono, 2019). Untuk informan penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam penyelenggara bantuan program keluarga harapan (PKH) seperti kepala desa/perangkat desa, pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Rimba Soping.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam penelitian, peneliti tentu membutuhkan data-data pendukung baik yang diperoleh dari berbagai sumber seperti penelitian-penelitian terdahulu, buku, jurnal-jurnal penelitian dan juga data yang langsung di peroleh dari tempat penelitian. Untuk data yang diperoleh langsung dari lapangan data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi mendalam langsung dengan masyarakat Desa Rimba Soping.

Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis pada penelitian ini maka cara menganalisisnya adalah sebagai berikut ini:

1. Reduksi Data yaitu merangkum, memilah-milah data, memfokuskan pada hal-hal penting sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menarik kesimpulan yang akhirnya akan dibuktikan.
2. Penyajian Data yang mana data bisa berbentuk tulisan maupun kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi agar peneliti tidak kesusahan dalam menguasai informasi baik dengan semua atau tugas-tugas tertentu dari hasil penelitian.
3. Menarik Kesimpulan, kesimpulan yang telah diungkapkan diawal sifatnya masih sementara dan bisa berubah apabila ditemukan bukti-bukti lain. Tetapi apabila pada awal kesimpulan yang sudah diungkapkan dapat didukung dengan bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang telah diungkapkan adalah kesimpulan yang andal dan kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rimba Soping Padangsidiimpuan Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidiimpuan

Adapun pengertian implementasi itu adalah merupakan segala tindakan yang dilakukan baik itu individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau juga swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah atau sudah ditentukan dalam suatu kebijakan (Wahab, 2015). Secara umum dapat diketahui bahwa implementasi terkait dengan kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dimana fokusnya adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Dwiyanto, 2015). Apabila suatu kebijakan publik dirangkai dengan implementasi maka dapat dikatakan bahwa implementasi tersebut merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Pressman dan Wildavsky (Wahab) tujuan dari sebuah kebijakan diimplementasikan adalah

1. Untuk melaksanakan rencana yang telah atau sudah disusun dengan cermat, baik itu oleh individu atau juga kelompok
2. Untuk menguji serta juga mendokumentasikan suatu prosedur di dalam penerapan rencana atau juga kebijakan
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan atau juga kebijakan yang telah atau sudah dirancang
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat di dalam menerapkan suatu kebijakan atau juga rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah atau sudah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Sesuai dengan sasaran dari kebijakan adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Sama halnya di Desa Rimba Soping untuk membantu masyarakat desa dalam memenuhi kehidupan yang layak maka pemerintah memberikan solusi melalui program jaminan sosial. Seperti pada wawancara yang dilakukan di masyarakat Desa Rimba Soping yang menyatakan bahwa bantuan yang telah diterima melalui program ini sudah berjalan sebagaimana semestinya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di desa ini dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan bantuan PKH telah berlangsung dari tahun 2015 hingga saat ini. Hasil wawancara dengan warga lainnya yang memberikan pendapat mengenai bantuan program keluarga harapan (PKH) bahwa pelaksanaan bantuan ini PKH ini masih harus diperhatikan kembali untuk waktu pemberiannya atau pencairan dananya, karena pencairan dananya masih tidak sesuai dengan jadwal

yang ditentukan pemerintah sehingga tidak pasti waktu pencairannya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007, dimana hal ini dikenal dunia dengan nama *program bantuan tunai bersyarat* dan telah memberikan dampak yang positif dalam menekan angka kemiskinan yang dihadapi berbagai bangsa yang menerapkan bantuan ini khususnya kemiskinan jangka panjang. Program Keluarga Harapan menjadi solusi bagi masyarakat penerima dana, khususnya ibu yang sedang mengandung/menyusui dan anak-anak dalam menggunakan fasilitas baik untuk kesehatan maupun untuk pendidikan mereka. Bantuan ini juga ditujukan untuk mereka yang sudah berusia lanjut dan mereka yang berkebutuhan khusus yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut Kementerian Sosial RI yang dikutip dari situs Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk pencairan dana bagi penerima disalurkan dalam pertahunnya sebanyak empat periode yaitu :

- Periode pertama yaitu antara Januari-Maret
- Periode kedua yaitu antara April-Juni
- Periode ketiga yaitu antara Juli-September
- Periode keempat yaitu antara Oktober-Desember

Sedangkan untuk nominal dana bagi sipenerima yang diterima oleh keluarga penerima manfaat sebagai berikut :

1. Ibu hamil dan masa nifas: Rp 3.000.000 per-tahun atau Rp 750.000 setiap periode.
2. Balita usia 0-6 tahun: Rp 3.000.000 per-tahun atau Rp 750.000 setiap periode.
3. Lansia berusia 70 tahun ke atas: Rp 2.400.000 per-tahun atau Rp 600.000 setiap periode.
4. Penyandang disabilitas: Rp 2.400.000 per-tahun atau Rp 600.000 setiap periode.
5. Siswa Sekolah Dasar: Rp 900.000 per-tahun atau Rp 225.000 setiap periode.
6. Siswa Sekolah Menengah Pertama: Rp 1.500.000 per-tahun atau Rp 375.000 setiap periode.
7. Siswa Sekolah Menengah Atas: Rp 2.000.000 per-tahun atau Rp 500.000 setiap periode.

Bagi mereka yang berhak menerima bansos PKH, pencairan bisa dilakukan di kantor Pos dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Besaran bantuan yang melalui bantuan PKH tersebut memang tidak sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan tetapi dapat meringankan beban untuk pada keluarga miskin di Desa Rimba Soping, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang menyebutkan bahwa bantuan program keluarga harapan (PKH) bagi penerima bantuan cukup membantu mengatasi keuangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di keluarganya walaupun sebenarnya masih sangat kurang, tetapi setidaknya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu hasil wawancara dengan masyarakat lain yang menjelaskan bahwa nominal bantuan PKH tidak sebanding dengan kebutuhan hidup akan tetapi memberikan manfaat positif bagi

penerima yang sebagian besar mereka adalah petani. Dari wawancara yang dilakukan pada masyarakat penerima memang menunjukkan hasil yang positif terhadap bantuan PKH dengan terbantunya para penerima dana bantuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, dan kesehatan. Walaupun pada hakikatnya tidak dapat memberantas kemiskinan itu sendiri.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Program Keluarga Harapan

Merujuk pada penjelasan Mazmanian (Subarsono, 2019) bahwa dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :

1. Karakteristik dari masalah . Mudah/tidaknya masalah dikendalikan
2. Karakteristik Kebijakan / Undang-undang. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi
3. Variabel lingkungan. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan dana bersyarat bagi masyarakat Desa Rimba Soping Padangsidimpuan Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan belum dapat dikatakan berhasil karena dari karakteristik masalah yang ada di desa tersebut sudah kompleks tidak hanya dari tingkat pendidikan kepala keluarga yang tentunya akan berpengaruh kepada pekerjaan serta penghasilan yang diterima namun juga dari variabel lingkungan yang ada. Di mana Desa Rimba Soping merupakan desa yang masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani. Namun banyak dari mereka yang tidak memiliki lahan sendiri, dengan kata lain mereka dalam sistem upah bagi hasil. Tentunya hasil yang diperoleh tidaklah sebanyak bila mereka memiliki lahan sendiri.

Sementara jumlah anak-anak yang usianya masih dalam usia sekolah di masyarakat desa ini berjumlah banyak. Sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan hasil yang diterima dari upah bagi hasil tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan mereka, baik kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan dan lainnya. Lingkungan sekolah yang tidak tersedia dengan lengkap, di desa ini hanya memiliki fasilitas sekolah SD (sederajat) hingga SMP (sederajat) juga akan mempengaruhi pengeluaran yang ada dalam setiap keluarga. Bagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya akan menambah biaya pengeluaran dibanding dengan bila sarana pendidikan (sekolah) tersebut ada di desa tersebut.

Laju pertumbuhan penduduk di Desa Rimba Soping juga lebih besar dari semua desa yang ada di Padangsidimpuan Kecamatan Angkola Julu, hal tersebut seperti yang tertera dalam daftar dibawah ini:

Daftar 1. Laju Pertumbuhan Masyarakat

Nomor	Desa / Kelurahan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Simatohir	8,44
2	Rimba Soping	18,41
3	Mompang	14,73
4	Batu Layan	7,23
5	Joring Lombang	11,82
6	Joring Natobang	12,40
7	Simasom	10,51
8	Pintu Langit Jae	16,48

Sumber : BPS Padangsidimpuan 2023

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di banding desa yang lain dalam kecamatan yang sama tentunya kebijakan/undang-undang dalam hal program keluarga harapan ini juga harus menjadi perhatian dalam mengimplementasikannya, karena biar bagaimanapun hal ini tentunya akan mempengaruhi keberhasilan program keluarga harapan tersebut dalam pencapaian sasaran/target yang diharapkan. Dalam hal pengimplementasian kebijakan/undang-undang tentang bantuan dana program keluarga harapan ini juga perlu diperjelas dan ditegaskan besarnya nominal juga waktu pencairannya, karena masih adanya keluarga penerima dana program keluarga harapan ini yang hanya menerima dua kali dalam setahun bahkan ada yang satu kali saja dan jumlahnya pun tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa yang mengaku bahwa perlunya sebuah kejelasan dalam waktu pencairan dana dan jumlah nominalnya, sebab dalam pencairan terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga dari pernyataan tersebut benarlah apa yang dikatakan oleh Mazmanian (Subarsono, 2019) bahwa suatu kebijakan/undang-undang sebelum diimplementasikan haruslah dilihat dari beberapa aspek, yaitu: Karakteristik dari masalah, Karakteristik kebijakan/undang-undang, dan Variabel lingkungan sehingga tingkat keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan/undang-undang tersebut dapat dicapai.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diketahui bahwa implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rimba Soping Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan belum dapat dikatakan berhasil namun cukup membantu masyarakat (keluarga penerima manfaat) dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari serta dalam pembiayaan sekolah anak-anak mereka. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari berhasilnya implementasi program keluarga harapan (PKH) yaitu tingkat pendidikan kepala keluarga yang mayoritas masih rendah, penghasilan yang di peroleh dari buruh tani masih rendah, pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari semua desa yang ada di Padangsidimpuan Kecamatan Angkola Julu, kebijakan dari pemberian bantuan dana dalam program ini belum maksimal sebagaimana tujuan yang diharapkan baik dalam jumlah nominal dan waktu pencairan dana bantuan

sehingga bantuan tersebut belum dapat dipergunakan dengan maksimal.

5. REFERENSI

- Ernawati dan Yusnadi. 2020. Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. *Jurnal Education For All*. Vol. 9 (1) : 16-23.
- Dwiyanto, Indiahono. 2015. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Grava Media.
- Fadillah, Putra. 2013. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Indrawati, Putri Ayu dan Agus Satmoko Adi. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi tentang Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Juwet, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri). *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 6 (3) : 321-335.
- Kholif, K.I., I. Noor dan Siswidiyanto. 2015. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Martono, Nanang. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Parwoto. 2001. Kemiskinan. Bappenas.
- Silalahi, Uber. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2019. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahdaniah, A., Budi Setiawan dan Muhammad Tahir. 2022. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid-19 Di Desa Latelang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. *Jurnal KIMAP : Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. Vol 3 (1).
- Wahab, Solichin A. 2015. Pengaturan Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Malang : Bumi Aksara.